

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Aminuddin, dan Prof.Dr. H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum Ed.Revisi*. Jakarta:Rajawali Pers, 2018.
- Dewata, Mukti Fajar Nur dan Yulianto Achman. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Perizinan*. Surabaya: Penerbit Yuridika, 1993.
- . *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Haryati, Dwi. *Hukum Administrasi Negara*. Edited by Richo Andi Wibowo. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2024.
- Helmi. *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Prayudi. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981. 80.
- Ridwan. *Hukum Administrasi Di Daerah*. Yogyakarta: FH UI Press). 2009. 123.
- Satjipto Raharjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2000.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 1984.
- . *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 2010.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Sujamto. *Otonomi Daerah yang Nyata dan Bertanggung Jawab*. Jakarta: Sinar Grafika, 1990. 17.
- Sumardjono, Maria S.W. *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2019.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2003.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 22 Tahun 2025 tentang Kewenangan Penerbitan Persetujuan Lingkungan.

Peraturan Menteri/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Kompetensi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Lembaga Penyedia Jasa Penyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, dan Uji Kelayakan Lingkungan Hidup.

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 60 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur.

Peraturan Bupati Magetan Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Kabupaten Magetan.

Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (2020).

ARTIKEL JURNAL

- Akib, Muhammad. "Wewenang Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Era Otonomi Daerah." *Media Hukum* 19, no. 2 (2012): hlm.243. <https://doi.org/https://doi.org/10.18196/jmh.v19i2.103>.
- . "Wewenang Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Era Otonomi Daerah," *Jurnal Media Hukum* 19, no.2 (2012): hlm.245-246.
- Ardiansyah, Feri. "Tantangan Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dalam Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja." *Seminar Nasional Semarang* (2020): hlm.17-18.
- Christiawan, Rio. "Perizinan Berbasis Online Single Submission untuk Mewujudkan Kemudahan Berusaha". *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 50 no.1(2021): hlm.60.
- Evan Devaraa, Maret Priyantab, Yulinda Adharanic. "Inovasi Pendekatan Berbasis Risiko Dalam Persetujuan Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja Risk Based Approach Inovation On Environmental Agreement Based." *Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, Dan Agraria* 1, no. 1 (2021): hlm.105.
- Fatchullah, Muchamad Ja'abi. "Pelaksanaan Prosedur Perizinan Lingkungan Berdasarkan Pp No.5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Beserta Hambatan Pelaksanaannya." *Diponegoro Law Journal* 11, no. 2 (2022).
- Khan, Anisur Rahman. "Policy Implementation: Some Aspects and Issues." *Journal of Community Positive Practices* XVI, no. 3 (2016): 4.
- Kumandhani, Prahesti Sekar. "Penegakan Hukuim Lingkungan Hidup oleh Pemerintah Daerah dalam Kerangka Otonomi Daerah." *Dharmasiswa: Jurnal Program Magister Fakultas Hukum Universitas Indonesia* 1. no.3(2021): hlm.1370-1372.
- Listiyani, Nurul, Muzahid Akbar Hayat, and Ningrum Ambarsari. "Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Melalui Instrumen Pengawasan: Rekonstruksi Materi Muatan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Al-Adl : Jurnal Hukum*

- 12, no. 1 (2020): hlm.116. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v12i1.2650>.
- Mohammad, F., Sutjahjo, S. H., Effendi, H., Sitanggang, I. S., & Sasongko, D. P. "Transformasi Kerangka Hukum Lingkungan Indonesia melalui Next Generation Framework: Evaluasi Normatif-Praktis Tata Kelola Terpadu." *Bina Hukum Lingkungan* 10. No.1(2025):129. <https://doi.org/10.24970/bhl.v10i1.473>.
- Nurjanah, Feriska, Aditya Prastian Supriyadi, and Miftahul Huda. "Mewujudkan Green Industry Melalui Optimalisasi Perizinan Berbasis Risiko : Studi Kesadaran Hukum Pada Industri Penyamakan Kulit Di Magetan" 6, no. 1 (2018): 108–22. <https://doi.org/https://doi.org/10.32493/jdmhkdmdhk.v16i1.46988>.
- Prasetyo, Erwin, dkk. "Penyederhanaan Perizinan Lingkungan Hidup di Kabupaten/Kota Melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang." *Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora* 1, No.4 (2024): 48.
- Rahayu, Fuji Puspita. Enos Paselle. dan Thalita Rifda Khaerani. "Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Online Single Submission (OSS) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Samarinda". *Journal Administrasi Publik* 9 no. 2 (2021): 5019.
- Rhiti, H., and Y. Sri Pudyatmoko. "Kebijakan Perizinan Lingkungan Hidup Di Daerah Istimewa Yogyakarta." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 28, no. 2 (2016): 267. <https://doi.org/10.22146/jmh.16725>.
- Rizki, Amanda Amelia. "Kajian Hukum Terkait Kepastian Hukum Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 28 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Untuk Menunjang Pertumbuhan Investasi Asing Di Indonesia Kementerian Investasi / Badan Koor." *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 4, no. 10 (2025): 232–40.
- Saija, Viva J. E. "Wewenang pemerintah dalam Pemberian Izin Lingkungan." *Jurnal SASI* 2., no.1(2014): 72-73.
- Wandi, Ardiansyah & Muhd Ar.Imam Riauan. "Kewenangan Pemerintah Daerah

Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Penerbitan Perizinan Berusaha Pasca Lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja.” *Jurnal Kajian Pemerintah(JKP)* 11, No.2 (2025): 744-745.

Wicaksono, Try Ananto Djoko. “Tinjauan Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan dalam Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.” *Jurnal Supremasi* 11, No. 2 (2021): 18.

Yudiantoro, Eduardus Gilang Ananta, Fatma Ulfatun Najicha, and Waluyo Waluyo. “Penerapan Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dalam Upaya Pengawasan Pencemaran Di Kabupaten Sukoharjo.” *Jurnal Discretie* 4, no. 1 (2023): 170. <https://doi.org/10.20961/jd.v4i1.71712>.

SKRIPSI

Pristanti, Adelia Tiara. “Responsivitas UPT Industri Kulit Dan Produk Kulit Magetan Dalam Pengelolaan Limbah Cair Industri Kulit Magetan.” Skripsi, Universitas Sebelas Maret, 2019.

Novitaklara, Rahmadya. “Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan Dalam Pencegahan Pencemaran Limbah Di Lingkungan Industri Kulit Magetan.” Skripsi, Universitas Sebelas Maret, 2019.

Paradhiva, Rr. Moza Adzani. “Pergeseran Peran Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman Pasca Undang- Undang Cipta Kerja Terhadap Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.” Skripsi, Universitas Gadjah Mada, 2025.

INTERNET

Dhuha, Fadhila. “Izin Lingkungan Versi OSS-RBA, Apa Aja Tuh?”. Partnerinlegal.id. <https://partnerinlegal.id/oss-rba-izin-lingkungan/>.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan. "Profil Dinas Lingkungan Hidup Dan Pangan Kabupaten Magetan.", <https://dlh.magetan.go.id/>.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, “Integrasi Persetujuan Lingkungan dalam Perizinan Berusaha,” KLHK,

<https://www.menlhk.go.id/news/integrasi-persetujuan-lingkungan-dalam-perizinan-berusaha>.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, “SP4N-LAPOR,” *menlhk.go.id*, <https://www.menlhk.go.id/public-service/sp4-n-lapor/> (diakses pada tanggal 2 Januari 2025).

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. “Akselerasi Implementasi Ekosistem Kemudahan Berusaha dan Pertumbuhan Investasi, Pemerintah Luncurkan PP Nomor 28 Tahun 2025.” *ekon.go.id*. <https://ekon.go.id/publikasi/detail/6451/akselerasi-implementasi-ekosiste>.

PT.Citra Melati, “Apa Itu PB UMKU (Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha)?”, *citramelati.co.id*, <https://citramelati.co.id/artikel/pb-umku-perizinan-berusaha-untuk-menunjang-kegiatan-usaha/>, (diakses pada tanggal 20 Oktober 2025).

Sukoco dan David Oliver Purba, “Belum Mampu Olah Limbah, Ratusan Pengusaha Penyamakan Kulit di Magetan Hentikan Produksi,” *kompas.com*, <https://regional.kompas.com/read/2020/03/02/12304611/belum-mampu-olah-limbah-ratusan-pengusaha-penyamakan-kulit-di-magetan> (diakses pada 13 Januari 2026).

LAIN-LAIN

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, “*Sosialisasi PP Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko.*” YouTube video, https://www.youtube.com/live/jJ27h_GkT3Q?si=pVVickLUhC1uzYsA, Diunggah tanggal 20 Juni 2025.